

BAB II

MANAJEMEN HUMAS DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

A. Manajemen Humas

1. Pengertian Humas

Manajemen adalah “persoalan mencapai sesuatu tujuan-tujuan tertentu dengan suatu kelompok orang-orang” (Sarwoto, 1978: 44) Siagian (1989: 5), manajemen adalah: “sebagai kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”.

Al Qur'an di jelaskan dalam Surat al-Hasyr menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. (الحسر: ١٨)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Hasyr ayat 18).

Sesudah Allah menyebutkan orang – orang munafik yang sesat dan menjelaskan bahwa apa yang mereka katakan itu bagai setan dalam menggoda dan menyesatkan, kemudian mengakhirinya dengan menyebutkan orang- orang yang sesat dari Bani An-Nadzir, bagaimana mereka tertipu dengan janji – janji menarik yang merupakan bencana dan siksa bagi mereka sendiri karena janji – janji itu mengandung keadaan mereka menasehati orang – orang mukmin agar tetap bertakwa dan mengerjakan di dunia mereka apa yang bermanfaat bagi mereka di akhirat,

sehingga mereka mendapatkan pahala besar dan kenikmatan yang abadi, juga agar mereka tidak melupakan hak – hak Allah, sehingga Allah tidak menjadikan tutup pada hati mereka yang mengakibatkan mereka tidak mengerjakan untuk diri mereka sendiri apa yang membawa kebaikan dan keberuntungan mereka (Al-Maragi, 1993: 91- 92).

Bila melihat kenyataan dan memperhatikan firman Allah SWT di atas, kita tidak bisa memastikan apa akan terjadi esok, jelas diperintahkan Allah SWT untuk berusaha semaksimal mungkin agar tidak mengalami kerugian di dunia maupun di akhirat kelak, oleh karena itu sudah saatnya mulai sekarang kita semua bila tidak ingin rugi dunia dan akhirat, dalam memanager kehidupan pribadi kita agar lebih baik.

Istilah hubungan masyarakat (humas) dikemukakan pertama kali oleh presiden Amerika Serikat yaitu Thomas Jefferson tahun 1807. Akan tetapi apa yang dimaksudkan pada waktu itu dengan istilah “*Public Relations*” adalah dihubungkan dengan “*Foreign Relations*” (Siagian, 1989: 114). Humas dapat diartikan sebagai “suatu kegiatan usaha yang berencana yang menyangkut itikad baik, rasa simpati, saling mengerti untuk memperoleh pengakuan, penerimaan dan dukungan masyarakat melalui komunikasi dan sarana lain (media massa) untuk mencapai kemanfaatan dan kesepakatan bersama”. (Mulyono, 2009: 201)

Humas di lingkungan organisasi kerja / instansi pemerintah termasuk juga di bidang pendidikan adalah rangkaian kegiatan organisasi/instansi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau

pihak-pihak tertentu di luar organisasi tersebut, agar mendapatkan dukungan terhadap efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kerja secara sadar dan sukarela (Nawawi, 1997: 73).

Dalam Al Qur'an terdapat juga anjuran untuk melakukan hubungan dengan sesama manusia (masyarakat), yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (المائدة: ٢)

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(QS. al-Maidah: 2) (Soenarjo, dkk., 2004: 156).

Ayat di atas melarang kaum muslimin menghalangi kaum musyrikin yang akan melaksanakan haji sesuai keyakinan mereka cukup menjadi bukti betapa tinggi toleransi yang diajarkan oleh islam. Memang, hal itu kemudian dilarang khusus untuk memasuki kota Mekkah tetapi larangan tersebut karena pertimbangan keamanan dan kesucian kota itu. Tetapi, toleransi yang diberikannya kepada penganut keyakinan lain untuk mengamalkan ajaran agamanya selain di kota tersebut tetap berlaku. Hingga kini, kita masih mengenal kebijaksanaan-kebijaksanaan khusus yang ditempuh oleh negara-negara demokrasi dalam mengatur siapa yang boleh dan tidak boleh mengunjungi kota atau tempat-tempat tertentu. Kesepakatan negara-negara untuk mengharuskan adanya visa untuk memasuki satu wilayah adalah salah satu cermin tentang sahnya

mengizinkan atau melarang seseorang memasuki satu tempat berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masing-masing negara (Shihab, 2002: 16).

Dalam hadits juga dijelaskan tentang pentingnya saling menolong seperti Hadits Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَحَدَكُمْ مَرَأةً أَخِيهِ (رواه الترمذي)

Dari Abu Hurairah Ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, 'Setiap orang dari kalian adalah cermin saudaranya.' (HR. Tirmidzi) (Muhammad, tt: 287).

Seorang Mukmin harus menolong Mukmin lainnya, tidak boleh menyakitinya, atau mengizinkan orang lain berbuat itu. Ia tidak boleh merendahkan Mukmin lain. Ia harus menghormati semua milik dan kehormatannya sebagai sesuatu yang suci,³⁶ sebagaimana Rasulullah bersabda:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ (رواه البخاري ومسلم)³⁷

Anas Ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, Demi dia yang menggenggam jiwaku, seorang belum beriman jikalau tidak mencintai tetangganya (saudaranya) seperti mencintai dirinya sendiri. “(HR. Bukhari dan Muslim) (Muslim, 1992: 68).

Hadits Anas bin Malik

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ. (رواه المسلم).

“Dari Anas RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tolonglah saudaramu yang menganiaya atau yang dianiaya. Dikatakan ya

Rasulullah ini kami menolongnya yang dianiaya, bagaimana menolongnya yang dianiaya? Rasulullah menjawab: peganglah di atas kedua tangannya.” (HR. Muslim) (Muslim, t.th: 247)

Hadits di atas pada dasarnya mendorong umat Muslim untuk saling mencintai dan peduli terhadap orang lain. Sebagaimana seseorang melihat wajahnya di depan cermin, begitu pulalah seseorang harus melihat saudaranya sehingga seandainya saudaranya bahagia, orang tersebut harus merasa bahagia. Sebaliknya, jika saudaranya sedih dan cemas, ia harus berbelas kasih dan berusaha menolongnya dengan menghilangkan kesedihan dan kecemasannya (Hamid, 2004: 16).

Pada dasarnya, prinsip tolong menolong yang kuat berpangkal pada keyakinan bahwa seorang manusia sebagai individu tidak akan berarti apa-apa apabila ia tidak hidup bersama dengan orang lain. Manusia sebagai pribadi sosial sesuai dengan kodratnya memerlukan bantuan orang lain dalam menjalani dilema dan tantangan kehidupan, sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ
لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه البخاري ومسلم)^{٥٥}

Abi Musa r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda: orang Mukmin bagi orang Mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan (H.R. Muttafaq Alaih) (Muhammad, tt: 287).

Hadis di atas menjelaskan bahwa umat Muslim adalah saudara, sebagaimana saudara yang diibaratkan sebuah bangunan yang saling mengisi, dan saling membantu. Umat Islam harus menyerupai satu bangunan yang padu, utuh dan kokoh yang dengan keutuhan, kepaduan

serta kekokohan tersebut menjadikan umat Islam menjadi umat berwibawa, disegani dan dihormati oleh golongan atau kelompok lain. Sehingga dari sini dapat dilihat bahwa salah satu tujuan menolong orang lain adalah untuk membentuk Muslim yang kuat, kuat dalam rangka membentuk umat yang bahagia, sejahtera dan saling peduli satu sama lain (Hasan, 2009: 199).

Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan sekolah yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinyu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat yang berkepentingan langsung dengan sekolah. Dengan demikian, kegiatan operasional pendidikan, kinerja dan produktivitas sekolah diharapkan semakin efektif dan efisien (Mulyasa, 2004: 164).

Jadi manajemen humas adalah usaha atau tindakan yang dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan control menuju ke arah pencapaian tujuan yaitu komunikasi yang bagus antara lembaga dengan masyarakat.

2. Unsur-unsur Humas

Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 54 (1) disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan (Redaksi Sinar Grafika, 2009: 35).

Humas pendidikan yang umumnya disebut komunikasi pendidikan yang lebih menekankan kepada bentuk hubungan penyampaian informasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian berita dari suatu sumber berita kepada orang lain. Memberikan berita kepada orang lain merupakan proses pemindahan ide penyampaian berita sendiri maupun ide dari orang lain (Arikunto dan Yuliana, 201: 273).

Arus komunikasi dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



—————→ : Garis penyampaian pesan

←----- : Garis pemberian jawaban

Komponen tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber (*source*)

Sumber adalah tempat yang menunjukkan pada asal diperolehnya suatu gagasan atau ide. Sumber ini harus jelas, lengkap dan mudah dipahami, jika misalnya pesan yang diterima tidak jelas, kurang dimengerti, kurang terperinci tentu akan disampaikan pada orang lain dengan tidak jelas.

b. Pengirim berita

Pengirim pesan atau ide disebut sebagai komunikator atau coder. Seperti telah disebutkan di atas, maka berita yang disampaikan kepada orang lain dapat bertambah tidak jelas, disebabkan karena pengirim beritanya. Oleh karena itu bagian pengirim berita dituntut suatu persyaratan bahasa yang harus baik, bagi seseorang yang akan menyampaikan berita kepada orang lain harus sehat, tidak dalam kegiatan setengah tidur, tidak gugup dan sebagainya.

c. Berita dan pesan atau isyarat (*message*)

Berita yang disampaikan biasanya berbentuk simbol-simbol yang mengandung arti. Pesan tersebut dapat berupa:

Gerak : lambaian tangan, anggukan kepala, kerlingan mata dan sebagainya

Suara : Dentuman meriam, klakson, dering, bahasa dan sebagainya.

Benda : tanda, tulisan, bendera putih, sabuk hitam dan sebagainya.

d. Media atau sarana penyampai berita

Media yaitu benda yang digunakan untuk menyampaikan berita misalnya, surat kabar (untuk berita tertulis) bahasa bermakna, televisi (berita gambar dan suara), seorang penyanyi dan sebagainya.

e. Penerima berita

Penerima berita yaitu orang yang diberi berita atau orang yang menjadikan sasaran untuk dipengaruhi oleh pengirim berita dengan penerima berita harus ada kepentingan bersama, ada saling pengertian dan saling ketergantungan. Sebagai contoh jika tidak saling pengertian adalah penyampaian berita yang terlalu cepat (bagi penerima) maka tindakan dapat dipahami oleh penerima itu.

f. Tujuan komunikasi

Seseorang yang mengirim berita tentu saja mempunyai tujuan untuk mempengaruhi penerima pesan atau berita tersebut. misalnya seseorang guru sebagai pengirim berita dan siswa sebagai penerima berita, Tujuan pengiriman pesan adalah perubahan tingkah laku siswa dalam bentuk “memahami” sebagai respon dari pokok bahasan tersebut (Arikunto dan Yuliana, 201: 274-275).

Jadi unsur-unsur humas terkait dengan pemahaman tentang realitas masyarakat yang ada di sekitar madrasah, sehingga pola kerja dan struktur organisasi yang di bentuk oleh humas berpusat pada kepentingan masyarakat sekitar.

3. Tugas Pokok Humas

Tugas-tugas pokok atau beban kerja humas suatu organisasi/lembaga adalah:

- a. Memberikan informasi dan menyampaikan ide (gagasan) kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkannya.
- b. Membantu pimpinan yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya.
- c. Membantu pimpinan mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau yang menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu.
- d. Membantu pimpinan dalam mengembangkan rencana dan kegiatan-kegiatan lanjutan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) sebagai akibat dari komunikasi timbal balik dengan pihak luar (Nawawi, 1997: 74).

Jadi tugas pokok humas adalah melakukan publisitas tentang kegiatan organisasi kerja yang patut diketahui oleh pihak luar secara luas. Kegiatannya dilakukan dengan menyebarkan informasi dan memberikan penerangan-penerangan untuk menciptakan pemahaman yang sebaik-baiknya di kalangan masyarakat luas mengenai tugas-tugas dan fungsi yang diemban organisasi kerja tersebut, termasuk juga mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah, sedang dan akan dikerjakan, berdasarkan visi, misi dan tujuan organisasi.

4. Asas-asas Humas

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, humas yang efisien harus memperhatikan asas-asas tertentu sebagai berikut:

- a. Obyektif dan resmi, semua informasi atau pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat harus merupakan suara resmi dari instansi/lembaga yang bersangkutan.
- b. Organisasi yang tertib dan berdisiplin, humas hanya akan berfungsi apabila tugas-tugas pokok organisasi / lembaga berjalan secara lancar dan efektif serta memiliki hubungan kerja ke dalam dan ke luar organisasi yang efektif pula.
- c. Informasi harus bersifat mendorong timbulnya keinginan untuk ikut berpartisipasi atau ikut memberikan dukungan secara wajar dari masyarakat.
- d. Kontinuitas informasi, humas harus berusaha agar masyarakat memperoleh informasi secara kontinyu sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu informasi lisan dan tertulis dapat dilakukan secara berkala dan pada waktu-waktu tertentu.
- e. Memperhatikan opini masyarakat, respons yang timbul di kalangan masyarakat sebagai *feedback* dari informasi yang disampaikan harus mendapat perhatian sepenuhnya. Respon masyarakat dapat berupa saran-saran, pendapat, kritik, keluhan atau pertanyaan (Nawawi, 1997: 74).

Asas-asas yang harus dimiliki oleh humas terkait dengan informasi yang diberikan harus bersifat realistis, tidak mengada-ada. Kejujuran

dalam penyampaian informasi juga sangat penting untuk menciptakan citra positif.

5. Fungsi Humas di Madrasah

Mulyasa (2004: 50) menyatakan fungsi humas antara lain adalah:

- a. Mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah.
- b. Untuk dapat menetapkan, bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah dan apa harapan-harapannya mengenai tujuan pendidikan di sekolah.
- c. Untuk memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat kepada sekolahnya, baik finansial, materiil maupun moril.
- d. Menimbulkan rasa tanggungjawab yang lebih besar terhadap kualitas pendidikan.
- e. Mengikutsertakan masyarakat secara kooperatif dalam usaha memecahkan persoalan pendidikan dan meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat.
- f. Memperkokoh tujuan serta peningkatan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat
- g. Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.

Jadi pada dasarnya dari pengertian fungsi pokok humas yang disebutkan di atas adalah menarik simpati masyarakat pada umumnya sehingga dapat meningkatkan relasi serta animo masyarakat terhadap sekolah tersebut, yang pada akhirnya menambah "*income*" bagi sekolah yang bermanfaat bagi bantuan terhadap tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Di luar itu humas mampu merubah citra masyarakat awam terhadap segala permasalahan dan kebijakan yang berhubungan dengan lembaga juga menghindarkan prasangka-prasangka yang tidak baik.

B. Masyarakat Madrasah

1. Pengertian Masyarakat Madrasah

Masyarakat adalah orang-orang atau golongan yang memiliki kepentingan bersama dalam suatu tindakan tertentu dan konsekuensinya serta yang dipengaruhinya (Ginn dan T.Welsh, 2003: 86).

Masyarakat merupakan semua aktor dalam konteks kelembagaan disebut sebagai stakeholder potensial. Yaitu kelompok yang memiliki keputusan-keputusan yang akan dibuat berkenaan dengan agenda pendidikan dan organisasi–organisasi yang berpartisipasi dalam proses ketetapan pendidikan. Sedangkan kelompok yang mengejar kepentingan mereka dalam situasi (konteks) suatu organisasi tertentu dalam institusi disebut stakeholder kinetik atau aktif (Ginn dan T. Welsh, 2003: 87). Pengambilan keputusan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan informasi tentang cakupan perhatian, sasaran dan komitmen dari penerima keuntungan dengan program yang diharapkan, serta tentang sarana alternatif untuk memenuhi sasaran dan perhatian tersebut sambil melanjutkan komitmen itu.

Jadi masyarakat madrasah adalah sumber daya pendidikan yang tiada bandingannya bagi satuan pendidikan yang berperan serta baik perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

2. Tugas dan Kewajiban Masyarakat Madrasah

Keterlibatan masyarakat dalam merancang suatu unit kurikulum baru dapat menyiagakan para perancang dalam topik-topik sensitif yang harus dihindari. Para guru mungkin dapat menyerahkan alternatif untuk mengorganisir unit tersebut.

Desentralisasi merupakan suatu metode utama bagi keterlibatan masyarakat atau stakeholder. Akan tetapi dengan metode ini tidak semua masyarakat berpartisipasi dengan intensitas yang sama di semua kesempatan. Sebagaimana 3 kategori stakeholder berikut:

a. Produsen

Suatu kategori stakeholder yang memperhatikan keputusan tentang konsepsi dan rancangan proses pendidikan, pelatihan personal yang akan dilibatkan, serta produksi fasilitas dan material yang akan digunakan. Fokusnya adalah konstruksi atau produksi kapasitas untuk mendidik. Stakeholder ini meliputi:

- 1) Perusahaan konstruksi
- 2) Perusahaan yang menghasilkan materi pengajaran termasuk buku teks
- 3) Penjual pakaian seragam
- 4) Penulis buku teks dan kurikulum

Perhatian utama stakeholder ini ialah persediaan atau produksi input ke proses pendidikan. Karena ekonomi skala kebanyakan organisasi ini ialah organisasi-organisasi Nasional, bahkan di negara-

negara yang tingkat desentralisasinya tinggi sekalipun (Ginn dan T.Welsh, 2003: 89).

b. Distributor

Perangkat minat kedua terfokus pada lokasi keputusan tentang distribusi produk yang ada. Keputusan ini mengenai akses kependidikan dan proses pengajaran (termasuk penilaian belajar yang masuk dalam bagian dari pengajaran). Keputusan tentang dimana sekolah melibatkan stakeholder yang berbeda-beda dibanding keputusan tentang apakah sekolah akan dibangun, juga siapa yang akan dipertahankan.

Proses pengajaran itu sendiri memerlukan keputusan yang dibuat terutama oleh para guru dengan tingkat kontrol tidak langsung yang bermacam-macam oleh administrator, pengurus dan lain-lain.

Kategori ini meliputi:

- 1) Kelompok orang tua
- 2) Wakil guru (yaitu persatuan)
- 3) Manager sekolah dan
- 4) Kelompok-kelompok pengelola yang dibatasi dalam keputusan tentang aplikasi kurikulum resmi

c. Pengguna

Perangkat stakeholder ketiga memperhatikan manfaat hasil pendidikan yang dapat diambil. Pendidikan mentransformasikan individu, memberi mereka pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai

baru. Transformasi ini dapat menguntungkan individu-individu yang ditransformasikan dan mereka yang dapat memperoleh keuntungan dari pengetahuan yang meningkat, ketrampilan dan nilai-nilai. Para siswa dan orang tua dapat menggunakan pengetahuan dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Stakeholder ini lebih mengutamakan mutu pendidikan dan tentang pembiayaannya. Perhatiannya didorong oleh bagaimana pendidikan berhubungan dengan sasaran mereka dan terutama tidak berhubungan dengan aspek teknis pendidikan itu sendiri (Ginn dan T.Welsh, 2003: 90).

Madrasah Harus memiliki karakteristik partisipasi warga sekolah dan masyarakat yang tinggi. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki diikuti makin besar rasa tanggung jawab dan seterusnya makin besar tingkat dedikasinya.

Sebagai bagian dari masyarakat, setiap individu dituntut peran sertanya dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di semua bidang pembangunan, terutama sekali pada bidang masing-masing. Untuk itu Madrasah sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai potensi keagamaan dan kependidikan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari perkembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dan masyarakat harus dijadikan sebagai pendukung utama Madrasah (*stakeholder* atau *user*) untuk meningkatkan kepentingan dalam mengembangkan pendidikan yang berbasis masyarakat

(*community based education*). Dengan kata lain masyarakat yang bertanggung jawab terhadap kemajuan madrasah.

C. Berkembangnya Partisipasi Masyarakat Madrasah

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan, memiliki beberapa tingkatan:

1. Derajat keterlibatan, mulai dari sekedar mengetahui adanya suatu usaha sampai dengan ikut aktif menyumbangkan pikiran, tenaga, maupun materi.
2. Prakarsa keterlibatan, yang dapat dibedakan antara keterlibatan spontan dengan persuasif atau melalui paksaan. Yaitu tingkat otoritas, yang pada dasarnya memberikan wewenang kepada kelompok untuk memantapkan keputusannya.
3. Organisasi keterlibatan, yang dapat dibedakan menjadi keterlibatan perseorangan atau secara kelompok. Hal ini dapat dikatakan sebagai tingkat penasihat/sugesti yang dibangun atas dasar saling mengerti.
4. Sikap dalam keterlibatan, mulai dengan yang mendukung, setuju sampai yang menentang. Hal ini merupakan tingkat saling mengerti yang tujuannya untuk membantu para anggota kelompok agar memahami masing-masing fungsi dan sikap yang dapat mengembangkan kerja sama yang lebih baik. Dengan demikian secara pribadi mereka akan lebih banyak terlibat, bersikap kreatif dan juga lebih bertanggung jawab.

Sekolah-sekolah Islam seperti Madrasah Ibtidaiyah sebagian besar masih sering menghadapi kekurangan biaya dalam mengadakan alat

pengajaran. Dalam hal ini seringkali yayasan kurang memperhatikan unsur-unsur tersebut. (Tafsir, 2000: 94)

Selain itu kondisi lingkungan yang kurang kondusif juga mengganggu proses pembelajaran yang ada di madrasah. Oleh karena itu masyarakat atau orang tua siswa sebagai mitra madrasah berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang didasari dengan pendidikan keluarga.

Sistem Pendidikan Nasional perlu terus di dorong untuk meningkatkan pertumbuhan, peranan dan tanggung jawab serta mutu pendidikannya yang tetap mengindahkan ciri-ciri khas perguruan swasta yang bersangkutan serta syarat-syarat pendidikan secara umum (Tilaar, 1999: 83). Masyarakat yang dimaksud adalah bukan hanya orang tua siswa akan tetapi orang-orang atau golongan yang memiliki kepentingan bersama dalam suatu tindakan tertentu dan konsekuensinya serta yang dipengaruhinya disebut stake holder. (Welsh, 2003: 86)

Beberapa macam stakeholder menurut konteks antara lain semua aktor dalam konteks kelembagaan disebut sebagai stakeholder potensial. Yaitu kelompok yang memiliki keputusan-keputusan yang akan dibuat berkenaan dengan agenda pendidikan dan organisasi–organisasi yang berpartisipasi dalam proses ketetapan pendidikan. Sedangkan kelompok yang mengejar kepentingan mereka dalam situasi (konteks) suatu organisasi tertentu dalam institusi disebut stakeholder kinetik atau aktif (Welsh, 2003: 87). Masyarakat

terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan organisasi meningkatkan kemungkinan tindakan yang berhasil.

Madrasah Harus memiliki karakteristik partisipasi warga sekolah dan masyarakat yang tinggi. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki diikuti makin besar rasa tanggung jawab dan seterusnya makin besar tingkat dedikasinya.

Sudah menjadi konsep umum bahwa proses belajar yang baik tidak cukup hanya dilaksanakan di sekolah saja, melainkan sebaiknya diperluas ke lapangan atau masyarakat. Dengan belajar di masyarakat, peserta didik dapat mengamati pemandangan yang wajar atau yang asli di alam terbuka. Hal ini akan dapat meningkatkan mereka, menghindari kebosanan, melihat dengan jelas manfaat pelajaran tersebut, dan lebih mudah berlatih karena fasilitas tersedia. Adapun salah satu bentuk belajar di masyarakat adalah karyawisata.

Hal yang dapat dilakukan orang tua / masyarakat dalam membantu peningkatan kualitas Madrasah Ibtidaiyah khususnya dan pendidikan umum pada umumnya yaitu:

1. Menciptakan budaya belajar di rumah. Pada jam-jam belajar, orang tua sebaiknya ikut belajar, misalnya membaca al-Qur'an, membaca majalah, menulis puisi, dan menulis program kerja sehingga tercipta budaya belajar.
2. Memprioritaskan tugas yang terkait secara langsung dengan pembelajaran di Sekolah/Madrasah. Jika banyak kegiatan yang dilakukan anak, maka utamakan yang terkait dengan tugas pembelajaran.

3. Mendorong anak untuk aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi sekolah, baik yang bersifat kurikuler maupun yang bersifat ekstra kurikuler.
4. Memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan gagasan, ide, dan berbagai aktivitas yang menunjang kegiatan belajar.
5. Menciptakan situasi yang demokratis di rumah, agar terjadi tukar pendapat dan pikiran sebagai sarana belajar dan membelajarkan.
6. Memahami apa yang telah, sedang dan akan dilakukan Sekolah/Madrasah, dalam mengembangkan potensi anaknya.
7. Menyediakan sarana belajar yang memadai sesuai dengan kemampuan orang tua dan kebutuhan sekolah (Mulyasa, 2004: 167-168).

Adapun bentuk partisipasi masyarakat pada madrasah yang terimplementasi dalam proses pembelajaran antara lain:

1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa. Dalam pendidikan, masyarakat mengadakan bimbingan keagamaan yang diprakarsai oleh tokoh ulama setempat.
2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang. Sumbangan ini didasari atas musyawarah seluruh komponen masyarakat yang berkepentingan. Seperti kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, tokoh masyarakat, tokoh ulama dan perangkat desa.
3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu, kelompok, dan instansi yang berada di luar lingkungan desa.

4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh komuniti, biasanya diputuskan oleh rapat komunitas sekolah yang menentukan anggarannya.
5. Sumbangan dalam bentuk kerja, biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat
6. Aksi massa atau gotong royong.
7. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri
8. Membangun proyek komunitas yang bersifat otonom. (Sastropetro, 1988: 16)

Bentuk partisipasi masyarakat dalam beberapa aspek yang erat kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan madrasah. Khususnya pendidikan agama Islam, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dalam manajemen.

Partisipasi dalam manajemen meliputi partisipasi masyarakat dalam menyusun pengurus madrasah dan partisipasi masyarakat dalam pengangkatan kepala sekolah, pembentukan komite sekolah dan lain-lain.

2. Partisipasi masyarakat dalam kurikulum.

Partisipasi masyarakat dalam kurikulum mencakup partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kurikulum muatan lokal, dan partisipasi masyarakat dalam penentuan hari libur.

3. Partisipasi masyarakat dalam perekrutan siswa.

Partisipasi masyarakat dalam perekrutan siswa dilakukan oleh dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat bekerja sama dengan guru, sebelum atau menjelang ajaran tahun baru.

4. Partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana, sarana dan prasarana.

Partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana, sarana dan prasarana mencakup dana untuk biaya pelaksanaan pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana.

5. Partisipasi masyarakat dalam berlangsungnya kehidupan beragama di madrasah. Partisipasi ini berupa partisipasi tokoh masyarakat dalam kegiatan beragama di Madrasah.

6. Partisipasi masyarakat dalam penyediaan lapangan kerja (Pidarta, 1997: 174).

Jadi pengambilan keputusan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan informasi tentang cakupan perhatian, sasaran dan komitmen dari penerima keuntungan dengan program yang diharapkan, serta tentang sarana alternatif untuk memenuhi sasaran dan perhatian tersebut sambil melanjutkan komitmen itu.

D. Peranan Penting Manajemen Humas bagi peningkatan Partisipasi Masyarakat di Madrasah

Hubungan sekolah dengan masyarakat (masyarakat) bertujuan antara lain untuk (1) memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, (2) memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan

masyarakat, dan (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah (Mulyasa, 2004: 50). Bent dan Kronenberg dalam Daryanto (2001: 75) mengemukakan tiga hal tujuan utama hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu:

1. *To prevent misunderstanding*, yaitu untuk mencegah kesalahpahaman antara masyarakat terhadap sekolah.
2. *To secure financial support*, yaitu untuk memperoleh sumbangan-sumbangan finansial dan material dari masyarakat.
3. *To secure corporation in policy marking*, yaitu untuk menjalin kerja sama dalam pembuatan kebijaksanaan-kebijaksanaan.

Hubungan kerja sama sekolah dan masyarakat dapat digolongkan menjadi tiga jenis hubungan, yaitu “(1) hubungan edukatif, (2) hubungan kultural dan (3) hubungan institusional”. (Mulyasa, 2004: 194)

Menurut Wahyu Sumidjo (2001: 334) dalam buku *kepemimpinan kepala sekolah*, tujuan pokok pengembangan hubungan efektif dengan masyarakat setempat adalah untuk memungkinkan orang tua dan warga wilayah berpartisipasi aktif dan penuh arti di dalam kegiatan sekolah. Sebagaimana diungkapkan di muka bahwa orang tua sebagai penanggung jawab utama terhadap pendidikan anak-anaknya dan karena keterbatasannya menyerahkan tanggung jawab orang tua tersebut.

Adapun bentuk keterlibatan orang tua dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah dapat berupa keterlibatan dalam kegiatan madrasah, dalam kegiatan instruksional madrasah dalam aktifitas belajar di rumah, dalam menjalin hubungan komunikasi antara sekolah dan rumah, dan dalam mengelola madrasah (Daryono, 2001: 125-126).

Masyarakat adalah siapapun baik perorangan maupun kelompok, baik yang berdomisili disekitar madrasah maupun tidak yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang relevan dan kongruen dengan program madrasah.

Berbeda dengan sekolah umum, masyarakat madrasah adalah meliputi pemerintah daerah, kelompok orang tua murid, yayasan, dewan madrasah, pesantren, asosiasi profesi, LSM, masyarakat umum., dan lembaga sosial dan lain-lain yang selanjutnya di sebut dengan lingkungan eksternal madrasah.

Madrasah memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan dalam melaksanakan program tersebut. Di sisi lain, masyarakat memerlukan jasa madrasah untuk mendapatkan program-program pendidikan yang relevan. Jalinan semacam itu dapat terjadi jika kepala madrasah aktif dan dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan. Sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran surat asy-Syuraa ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (الشورى : ٣٨)

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (QS. As-Syuraa: 38) (Departemen Agama Republik Indonesia, 2006: 389).

Setelah Allah SWT. Menyebutkan dalil – dalil atas keesaan-Nya dan keagungan kekuasaan-Nya dengan penciptaan langit dan bumi, serta berlayarnya kapal – kapal membelah gelombang di lautan, maka dilanjutkan dengan suruhan agar tidak mencintai dunia dengan segala perhiasannya. Karena orang yang tidak mau memperhatikan dalil – dalil, hanyalah orang yang mencintai dunia dengan tujuan ingin menjadi pemimpin dan gemar kepada kemegahan. Adapun bila dunia ini menjadi kecil dalam pandangan

seseorang, maka orang itu takkan berpaling kepadanya, dan dia mengambil manfaat dari dalil – dalil serta mengarahkan pandangannya kepada kerajaan langit dan bumi. Kemudian Allah SWT menerangkan pula, bahwa apa yang ada pada sisi-Nya adalah lebih baik bagi orang yang beriman dan bertawakkal kepada-Nya, serta hindari dosa – dosa besar dan kekejian – kekejian, sedang ia tunduk dan patuh kepada perintah – perintah Allah dan meninggalkan larangan – larangan-Nya, disamping mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan tidak mengharuskan suatu perkara kecuali sesudah dimusyawarahkan dan membela diri terhadap orang yang menganiayanya (Al-Maragi, 1993: 91- 92).

Berdasarkan Ayat di atas maka dapat diketahui bahwa prinsip kerjasama dan saling bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah dalam hal ini kebijakan sekolah dengan berbagai pihak.

Sahabat merupakan nikmat Allah yang diberikannya kepada umat Islam di dunia ini, bersahabat akan menjadi suatu kenikmatan, apabila didasari atas tujuan karena Allah, dan akan menjadi kebahagiaan apabila diatur dengan akhlak atau kaidah-kaidah atau norma-norma yang datangnya dari Allah SWT dan Rosul-Nya.

Allah SWT berfirman :

...وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا... (ال عمران : ١٠٣)

Dan ingatlah nikmat Allah atas kamu tatkala kamu bermusuhan-musuhan kemudian Allah jadikan hati-hati kamu lunak, kemudian atas kenikmatan – NYA, kamu menjadi sahabat (Ali Imron : 103) (Soenarjo, dkk., 2004: 93).

Ayat di atas mengarah pada perintah mengingat nikmat-Nya merupakan alasan atau dalil yang mengharuskan mereka bersatu padu, berpegang dengan tuntunan Ilahi, ini sejalan dengan kebiasaan al-Qur'an yang bila memerintahkan sesuatu atau melarangnya menyertakan dalil dan alasan perintah atau larangan atau paling tidak memerintahkan untuk memikirkannya. Itu terlihat dalam berbagai perintah dan larang-Nya baik menyangkut akidah – seperti tentang keesaan Allah yang penuh dengan aneka argumentasi atau syariat seperti ketika memerintahkan puasa dan zakat, atau melarang riba dan minuman keras, maupun dalam soal akhlak- seperti ketika memerintahkan berbakti kepada ibu bapak, khususnya ibu, yang berpayah – payah menyusutkan anak (Shihab, 2002: 206).

Menurut Fakhruddin ar-Razi sebagaimana di kutip oleh Shihab (2002: 207) menyatakan “Setiap orang yang berjalan pada jalan yang sulit khawatir tergelincir jatuh, tetapi jika dia berpegang pada tali yang terulur pada kedua ujung jalan yang dilaluinya, dia akan merasa aman untuk tidak terjatuh, apalagi jika tali tersebut kuat dan cara memegangnya pun kuat. Yang memilih tali yang rapuh atau tidak berpegang teguh – walau talinya kuat , kemungkinan besar akan tergelincir sebagaimana dialami oleh banyak orang”.

Hubungan yang harmonis ini akan membentuk:

1. Saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja.
2. Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing.
3. Kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah (Mulyasa, 2004: 51).

Hubungan madrasah dengan masyarakat dimaksudkan untuk 1) mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap madrasah, 2) menilai program madrasah, 3) mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan peserta didik, 4) mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan madrasah dalam era globalisasi, 5) membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap madrasah, 6) memberi tahu masyarakat tentang pekerjaan madrasah, 7) mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program madrasah.

Hubungan madrasah dengan masyarakat sangat besar manfaat dan artinya bagi kepentingan pembinaan dukungan moral, material dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Sedangkan bagi masyarakat dapat mengetahui berbagai hal mengenai madrasah dan inovasi-inovasi yang dihasilkan, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan tekanan, dan tuntutan terhadap madrasah. Untuk kepentingan tersebut, dapat dilakukan berbagai teknik dan media seperti mengadakan rapat atau pertemuan, surat-menyurat, buku penghubung, buletin madrasah dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat bagi peserta didik maupun orang tua (Departemen Agama RI, 2005: 66).

Berdasarkan dimensi kepentingan madrasah, hubungan madrasah dengan masyarakat bertujuan untuk:

1. Memelihara kelangsungan hidup madrasah.
2. Meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.
3. Memperlancar kegiatan pembelajaran.

4. Memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program-program madrasah.

Sementara berdasarkan dimensi kebutuhan masyarakat, tujuan manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat adalah untuk

1. Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Memperoleh kemajuan madrasah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
3. Menjamin relevansi program madrasah dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
4. Memperoleh kembali anggota masyarakat yang terampil, makin meningkat kemampuannya dan ketakwaannya (Departemen Agama RI, 2005: 75).

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diungkapkan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

Memperhatikan dan memahami uraian di atas jika dihubungkan efektifitas MBS, barometer efektifitas dapat dilihat dari kualitas program, ketepatan penyusunan, kepuasan, keluwesan dan adaptasi, semangat kerja, motivasi, ketercapaian tujuan, ketepatan waktu serta ketepatan pendayagunaan sarana, prasarana dan sumber belajar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah (Mulyasa, 2004: 88).

Dalam konteks manajemen pendidikan, terdapat berbagai cara melibatkan masyarakat baik secara aktif maupun pro aktif. Menurut Siahaan (2006: 128-129), Cara-cara dilakukan untuk mengatur atau memanAg keterlibatan masyarakat antara lain melalui:

1. Menghimpun masyarakat yang peduli dengan pendidikan melalui komite sekolah.

2. Memilih dan menentukan anggota komite sekolah yang memiliki pandangan yang luas tentang pendidikan.
3. Menjadikan komite sekolah sebagai tempat masyarakat berhimpun, memberikan masukan dan bantuan baik yang bersifat material atau apa saja yang memungkinkan semakin efektifnya manajemen sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan.
4. Setiap keputusan yang diambil manajemen sekolah dalam konteks pelibatan masyarakat, dilakukan secara bersama-sama dengan pengurus komite sekolah.
5. Memberikan kesempatan kepada komite sekolah untuk mencari dana, mitra dan berbagai kepentingan sekolah.

Dengan demikian, posisi masyarakat harus dilibatkan secara aktif sehingga masyarakat memiliki kepedulian dengan dunia pendidikan khususnya sekolah di mana masyarakat itu sebagai pengguna jasanya. Hal ini perlu dipelihara agar kepedulian itu dapat dimanfaatkan sekolah dalam memenuhi berbagai kebutuhan operasional sekolah.

Di sisi lain sekolah atau madrasah merupakan lembaga pendidikan yang secara formal dan potensial memiliki peranan penting dan strategis bagi pembinaan generasi muda, khususnya bagi peserta didik. Dan orang tua peserta didik merupakan pemberi pendidikan pertama dan utama yang sangat besar pengaruhnya terhadap pembinaan dan perkembangan pribadi peserta didik.

Karenanya perlu dibutuhkan strategi yang tepat bagi terjalinnya hubungan yang harmonis antara madrasah dan orang tua serta masyarakat. Hubungan dengan masyarakat akan tumbuh jika masyarakat juga merasakan manfaat dari keikutsertaannya dalam program sekolah. Manfaat dapat diartikan luas, termasuk rasa diperhatikan dan rasa puas karena dapat menyumbangkan

Menurut Cutlip-Center-Broom sebagaimana dikutip oleh Morissan, (2008: 108) praktisi humas profesional dalam melaksanakan program humas harus terdiri atas empat langkah kegiatan atau sering juga disebut dengan empat langkah pemecahan masalah humas. Keempat langkah kegiatan inilah yang menjadi fungsi manajemen humas itu. Keempat langkah itu yaitu, 1) menentukan masalah (*defining the problem*), 2) perencanaan dan penyusunan program (*planning and programming*), 3) melakukan tindakan dan berkomunikasi (*taking action and communicating*) dan 4) evaluasi program (*evaluating the program*).

1. Menentukan masalah (*defining the problem*)

Tindakan pertama yang harus dilakukan praktisi humas sebelum menyusun program kerjanya adalah memahami situasi atau masalah yang ada. Langkah pertama ini meliputi kegiatan untuk meneliti dan mengawasi pengetahuan, pendapat, sikap dan tingkah laku masyarakat (pihak-pihak yang berkepentingan atau terpengaruh oleh tindakan dan kebijakan organisasi).

Dalam tahap pertama ini diperlukan adanya penelitian terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan penelitian di sini adalah *data collecting* (pengumpulan data) dan *fact finding* (pengkajian fakta).

Yang diteliti adalah aspek-aspek yang menyangkut hubungan organisasi dengan publik (Effendy, 1992: 98). Praktisi humas dapat menyusun dan menjawab serangkaian pertanyaan seperti: di mana posisi suatu institusi berada, apa yang diketahui atau tidak diketahui masyarakat

mengenai institusi tersebut, apakah ada kesalahan dalam pandangan mereka, dan sebagainya.

Data faktual yang sudah terhimpun merupakan keterangan mentah yang harus diolah terlebih dahulu. Dalam kegiatan pengolahan, kahumas melakukan perbandingan, pertimbangan dan penilaian, sehingga akhirnya menjadi informasi yang akurat. Data yang sudah matang, yang kemudian menjadi informasi itu, dipilih, diklasifikasikan, dipisah-pisahkan dan dikelompokkan-kelompokkan, lalu disusun sedemikian rupa sehingga akan memudahkan dalam perencanaan dan penggunaan selanjutnya (Effendy, 1992: 98).

Pada intinya, langkah pertama ini merupakan kegiatan inteligen untuk mengumpulkan informasi atau data yang menjadi dasar berpijak praktisi humas guna mengambil langkah selanjutnya (Morissan, 2008: 108).

2. Perencanaan dan penyusunan program (*planning and programming*)

Perencanaan dalam sebuah pendidikan menempati posisi yang strategis dalam keseluruhan proses pendidikan. Perencanaan pendidikan itu memberikan kejelasan arah dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga perencanaan dalam sebuah pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien (Sa'ud dan Abin, 2007: 46).

Masalah yang telah ditentukan pada langkah pertama digunakan untuk menyusun program, tujuan, tindakan dan strategi komunikasi. Langkah kedua ini mencakup tindakan untuk memasukkan temuan yang

diperoleh pada langkah pertama ke dalam kebijakan dan program organisasi. Langkah kedua ini merupakan proses untuk menjawab pertanyaan, "berdasarkan situasi yang telah kita pelajari, maka apa yang harus kita ubah, perbuat dan katakan?" (Sa'ud dan Abin, 2007: 108-109)

Proses perencanaan dan penetapan program humas mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menetapkan peran dan misi.
- b. Menentukan wilayah sasaran humas.
- c. Mengidentifikasi dan menentukan indicator efektivitas (*indicators of effectiveness*) dari setiap pekerjaan yang dilakukan.
- d. Memilih dan menentukan sasaran atau hasil yang akan dicapai.
- e. Mempersiapkan rencana tindakan yang terdiri dari:
- f. *Programming*, menentukan urutan tindakan yang akan dilakukan.
- g. Penjadwalan, *menentukan* waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan.
- h. Anggaran, menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan.
- i. Pertanggungjawaban, menetapkan siapa pihak yang akan menyatakan tujuan sudah tercapai atau belum.
- j. Menguji dan merevisi rencana sementara (*tentative plan*) sebelum rencana tersebut dilaksanakan.
- k. Membangun pengawasan, yaitu memastikan tujuan akan terpenuhi.
- l. Menentukan komunikasi yang diperlukan.

m. Pelaksanaan, memastikan persetujuan di antara semua pihak, siapa saja yang perlu dilibatkan dan langkah atau tindakan apa yang harus segera dilakukan (Sa'ud dan Abin, 2007: 153-154).

3. Melakukan tindakan dan berkomunikasi (*taking action and communicating*)

Dalam pelaksanaan hubungan sekolah-masyarakat perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi (Soetjipto dan Raflis, 1999: 195). Setelah mengumpulkan fakta dan menetapkan rencana, beberapa keputusan harus dibuat pada tahapan ini, yang mencakup tindakan apa saja yang harus dilakukan atau pesan apa saja yang ingin disampaikan, serta jenis media apa yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan dimaksud (Morissan, 2008: 183).

Pada tahap tindakan atau pelaksanaan humas, komunikasi banyak dilakukan. Keberhasilan komunikasi sangat ditentukan oleh tujuh hal, yaitu:

- a. Kredibilitas, komunikasi dimulai dengan iklim atau situasi kepercayaan. Iklim dibangun melalui tindakan organisasi yang menggambarkan kesungguhan untuk melayani pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat.
- b. Konteks, program komunikasi harus disesuaikan dengan realita lingkungan.

- c. Isi pesan, pesan harus memiliki makna dan memiliki relevansi dengan situasi yang dihadapi penerima pesan.
 - d. Kejelasan, pesan harus disampaikan dengan menggunakan istilahistilah yang sederhana.
 - e. Kontinuitas dan konsistensi, komunikasi memerlukan *repetisi* (pengulangan) untuk mencapai penetrasi. Repetisi, yang dilakukan dengan berbagai variasi, dapat memberikan sumbangan untuk pembelajaran dan persuasi, namun ceritanya harus tetap konsisten.
 - f. Saluran, praktisi humas harus menggunakan saluran yang sudah mapan (*established*) untuk menyampaikan pesan. Saluran yang dipilih haruslah saluran yang digunakan dan juga dihormati oleh khalayak sasaran.
 - g. Kemampuan penerima, komunikasi harus memperhitungkan kemampuan penerima. Dalam hal ini yang harus dipertimbangkan adalah ketersediaan khalayak, kebiasaan, kemampuan membaca dan pengetahuan yang mereka miliki (Morissan, 2008: 206).
4. Evaluasi program (*evaluating the program*)

Humas dapat dievaluasi atas dua criteria: pertama, efektivitasnya, yaitu sampai seberapa jauh tujuan telah tercapai, misalnya apakah memang masyarakat sudah merasa terlibat dalam masalah yang dihadapi sekolah, apakah ada perhatian terhadap kemajuan anaknya di sekolah, apakah mereka sudah menunjukkan perhatian terhadap keberhasilan sekolah, apakah mereka telah mau memberikan masukan untuk perbaikan sekolah,

dan sebagainya. Kedua, efisiensinya, yaitu sampai seberapa jauh sumber yang ada atau yang potensial yang telah digunakan secara baik untuk kepentingan kegiatan hubungan masyarakat. (Soetjipto dan Raflis, 1999: 196)

Penilaian atau evaluasi ini dimaksudkan agar di kemudian hari, jika suatu kegiatan yang sama dilakukan, tidak menjumpai lagi hambatan yang sama. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, kahumas harus mengambil kebijaksanaan tertentu, yang pada gilirannya melakukan penelitian, untuk kemudian mengadakan perencanaan, guna selanjutnya menggiatkan pelaksanaan. Dengan demikian, proses humas tidak berlangsung secara *linear*, melainkan *circular* atau melingkar, dari evaluasi dialirkan umpan balik (*feed back*) ke penelitian, yaitu menentukan masalah. Jelasnya, jika sudah dilakukan kegiatan melalui tahap penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan penilaian, hasil penilaian tersebut diteliti lagi, direncanakan lagi, dilaksanakan lagi dan dinilai kembali (Effendy, 1992: 104).

Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang secara formal dan potensial memiliki peranan penting dan strategis bagi pembinaan generasi muda, khususnya bagi peserta didik (Mulyasa, 2004: 95). Karenanya perlu dibutuhkan manajemen humas yang tepat bagi terjalinnya hubungan yang harmonis antara madrasah dan orang tua serta masyarakat. Peran humas akan penting bagi masyarakat, jika masyarakat merasakan manfaat dari keikutsertaannya dalam program sekolah. Manfaat dapat diartikan luas,

termasuk rasa diperhatikan dan rasa puas karena dapat menyumbangkan kemampuannya bagi kepentingan sekolah.

Jadi peran humas di madrasah adalah mengatur hubungan Madrasah Ibtidaiyah dengan masyarakat, hubungan yang terjalin diharapkan menghasilkan keuntungan satu sama lain, dan semua hubungan itu merupakan hubungan kerja sama yang bersifat pedagogis, sosiologis, dan produktif. Oleh sebab itu hubungan madrasah dengan masyarakat sangat penting dan menjadi bagian dari manajemen pendidikan, dalam hal ini dijalankan oleh Humas dan masyarakat Madrasah.

E. Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti gambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:

